

DAFTAR PUSTAKA

- Abkoriyah, H., & Dewi, T. T. (2017). Objektivitas Berita Di Harian Kompas Dan Kompas.Com (Analisis Isi Pemberitaan Kasus Pembunuhan Engeline). *Journal Of Strategic Communication*, 7(2), 40–53.
[Http://Journal.Univpancasila.Ac.Id/Index.Php/Coverage/Article/Download/574/346/](http://Journal.Univpancasila.Ac.Id/Index.Php/Coverage/Article/Download/574/346/)
- Achwandi, R. P. (2019). *Konstruksi Pemberitaan Penyerangan Tokoh Agama Di Indonesia Pada Media Online Kompas.Com Dan Republika.Co.Id Periode Februari 2018* (Vol. 7, Issue 2). Universitas Lampung.
- Afiah, N. (2015). Kepribadian Dan Agresivitas Dalam Berbagai Budaya. *Buletin Psikologi*, 23(1), 13. <https://doi.org/10.22146/Bpsi.10573>
- Aidi, S. H. (2020). *Framing Media Dalam Kampanye Politik Joko Widodo Pada Pemilihan Presiden Indonesia Tahun 2019 (Analisis Media Online Detik.Com Dan Kompas.Com)*. Universitas Siliwangi.
- Annisa, F. N. (2020). *Proses Peliputan Berita Di Media Online Liputan6.Com Kanal Tekno*. Universitas Pakuan.
- Arifin, A. (2003). *Komunikasi Politik: Paradigma Teori Aplikasi-Aplikasi Strategi Dan Komunikasi Politik Indonesia*. Balai Pustaka.
- Badara, A. (2012). *Analisis Wacana: Teori, Metode, Dan Penerapannya Pada Wacana Media*. Kencana.
- Barata, M. F., & Simanjuntak, M. B. (2019). Strategi Publisitas & Propaganda Politik (Studi Pada Kandidat Presiden & Wakil Presiden, Jokowi-KH. Ma'ruf Amin). *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 23(2), 135.
<https://doi.org/10.31445/Jskm.2019.2061>
- Budianto, H. (2019). *Kontestasi Politik Dalam Ruang Media*. Pranadamedia Group.
- Bungin, B. (2006). *Sosiologi Komunikasi*. Pranada Media Group.



3. (2008). *Kontruksi Sosial Media Massa*. Kencana.

H. (2002). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. PT Raja Grafindo.

- Cangara, H. (2006). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. PT Raja Grafindo.
- Cangara, H. (2016). *Pengantar Ilmu Komunikasi* (2nd Ed.). Rajawali Pers.
- Dahlia, R. R., & Permana, P. A. (2022). Oligarki Media Dalam Pusaran Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 Menuju 2024. *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 2(1), 65–81.
<https://doi.org/10.22225/Politicos.2.1.2022.65-81>
- Darmanto. (2015). Urgensi Perubahan Kebijakan Untuk Penegakkan Independensi Media Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi*, 10(1), 29–39.
<https://doi.org/10.20885/Komunikasi.Vol10.Iss1.Art4>
- Defi, A. P. (2019). *Framing* Berita Deklarasi Kampanye Jokowi - Makruf Dan Prabowo-Sandi Pada Pilpres Tahun 2019 Di Media Online. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 1(01), 32–38.
<https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/15>
- Effendy, O. U. (2002). *Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek*. Remaja Rosdakarya.
- Effendy, O. U. (2004). *Dinamika Komunikasi*. Remaja Rosdakarya.
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, Dan Politik Media Massa*. Penerbit Lkis.
- Fachrul, Z. (2015). *Teori-Teorika Komunikasi Dalam Perspektif Penelitian Kualitatif*. Ghalia Indonesia.
- Fajar, J. (2007). *Komunikasi Massa: Pengantar Teoritis*. Penerbit.
- Farid Pribadi, R. D. P. (2022). 3253-Article Text-8496-1-10-20220301. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 6 Nomor 1(E-IS SN), 2597–3657.
- Gitiyarko, V. (2023). *Survei Litbang “Kompas”: Publik Ingin Kedalaman Berita*. Kompas.Id.
<https://www.kompas.id/baca/riset/2023/02/17/survei-litbang-kompas-publik-inginkan-kedalaman-berita>
- ya, A. S. (2023). Sintesa Teori Konstruksi Sosial Realitas Dan Konstruksi Sosial Media Massa. *Dialektika Komunika: Jurnal Kajian Komunikasi Dan*



Pembangunan Daerah, 11(1), 75–89.
<https://doi.org/10.33592/Dk.V11i1.3498>

Hamad, I. (2004). *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis Terhadap Berita-Berita Politik*. Granit.

Hamidy. (2013). *Perspektif, Tabot Sebagai Identitas Masyarakat Kota Bengkulu Menurut Bergerian*. Universitas Airlangga.

Heryanto, Gun Gun, Dan F. (2011). *Komunikasi Politik*. Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hidayat, Z., Hasmawati, F., & Hamandia, M. R. (2024). Komunikasi Massa pada Media RRI Palembang dalam Eksistensi Media Online (RRI. CO. ID). *Jurnal Bisnis dan Komunikasi Digital*, 1(3), 10-10.

Husniati, A. M., & Maryam, M. (2020). Konstruksi Identitas Komunikasi Pemasaran Pariwisata Halal Aceh. *Jurnal Jurnalisme*, 9(1), 62.
<https://doi.org/10.29103/Jj.V9i1.3099>

Indonesia, C. (2023). *Poin-Poin Gagasan Tiga Bacapres Anies, Ganjar, Dan Prabowo Di UGM*. CNN Indonesia.
<https://www.cnnindonesia.com/Nasional/20230920132702-617-1001433/Poin-Poin-Gagasan-Tiga-Bacapres-Anies-Ganjar-Dan-Prabowo-Di-Ugm/2>

Irwanto, S. (2023). *Kampus Dinilai Sebagai Ajang Adu Gagasan Dan Debat Yang Ideal Bagi Bacapres-Bacawapres*. Tvonenews.Com.
<https://www.tvonenews.com/Daerah/Jatim/156859-Kampus-Dinilai-Sebagai-Ajang-Adu-Gagasan-Dan-Debat-Yang-Ideal-Bagi-Bacapres-Bacawapres>

Jajilah. (2024). Analisis Framing Isu Keberpihakan Media pada Pemberitaan Sistem Proporsional Terbuka/Tertutup Pemilu 2024 pada Media Kompas. Com. Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.



- Juditha, C. (2019). Agenda Setting Penyebaran Hoaks di Media Sosial. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 22(2), 155–168. <https://doi.org/10.20422/jpk.v22i2.669>
- Junaedi, F. (2013). *Komunikasi Politik: Teori, Aplikasi Dan Strategi Di Indonesia*. Buku Litera Yogyakarta.
- J. Severin, Werner. W. Tankard, James Jr. 2009. *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di dalam Media Massa*. Jakarta: Prenada Media Group. TM
- Karman. (2015). Construction Of Social Reality As Thought Movement (Theoretical Review On Social Construction Of Reality Peter L. Berger). *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika*, 5(3), 11–23.
- Kasimin, K. (2014). *Sisi Gelap Kebebasan Pers*. Pranadamedia Group.
- Katherine Miller. (2005). *Communication Theories: Perspectives, Processes, and Contexts*. New York: McGrawHill.
- Kestiyoyuni, H. (2022). Identifikasi Agenda Setting Dalam Produksi Berita Detik.Com “Pssi Luruskan Tudingan Shin Tae-Yong Soal Tak Booking Lapangan.” *Komunika : Journal of Communication Science and Islamic Da’wah*, 6(2), 81–92. <https://doi.org/10.32832/komunika.v6i2.7973>
- Khotimah, N. (2019). Tantangan Independensi Media Dalam Pemilu: Kasus Kompas.Com. *Islamic Communication Journal*, 4(Juli-Desember 2019), 1–6.
- Kompas.Com. (2018). *About Us*. Kompas.Com. <https://Inside.Kompas.Com/About-Us>
- Kompas.Com. (2023). *Deret Gagasan Ganjar, Prabowo, Dan Anies Jika Terpilih Jadi Presiden*. Kompas.Com. <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2023/09/20/12324141/Deret-Gagasan-Ganjar-Prabowo-Dan-Anies-Jika-Terpilih-Jadi-Presiden?Page=All#Page2>
- Com. (2023). *Kala Anies, Ganjar, Prabowo Bicara Soal Reformasi Hukum Dan Polisi....* Kompas.Com.



<https://Nasional.Kompas.Com/Read/2023/09/20/11202541/Kala-Anies-Ganjar-Prabowo-Bicara-Soal-Reformasi-Hukum-Dan-Polisi?Page=All#Page2>

Kompas.Com. (2023c). *Mimpi Ganjar, Prabowo, Dan Anies Jika Jadi Presiden: Akses Pendidikan Setara, Perluasan Lapangan Kerja*. Kompas.Com. <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2023/09/20/09013541/Mimpi-Ganjar-Prabowo-Dan-Anies-Jika-Jadi-Presiden-Akses-Pendidikan-Setara?Page=All#>

Kompas.Com. (2023d). *Saat Anies, Ganjar, Prabowo Dicecar Soal Harta Dan Persiapan Dana Kampanye*. Kompas.Com. <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2023/09/20/06000031/Saat-Anies-Ganjar-Prabowo-Dicecar-Soal-Harta-Dan-Persiapan-Dana-Kampanye?Page=All#>

Kompas.Com. (2023e). *Saat Ganjar, Prabowo, Dan Anies Bicara Soal KPK, Kontra Dengan Megawati....* Kompas.Com. <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2023/09/20/10144681/Saat-Ganjar-Prabowo-Dan-Anies-Bicara-Soal-Kpk-Kontra-Dengan-Megawati?Page=All#Page2>

Kriyantono, R. (2007). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Kencana.

Kurniawan, M. A. El. (2023). *Link Streaming Mata Najwa Adu Gagasan 3 Bacapres Hari Ini*. Narasi TV. <https://Narasi.Tv/Read/Narasi-Daily/Link-Streaming-Mata-Najwa-Adu-Gagasan-3-Bacapres-Hari-Ini>

Kurniawan, I. (2011). *Strategi Surat Kabar Harian Riau Pos Dalam Meningkatkan Kualitas Isi Berita*. Universitas Islam Negeri Sultasyarif Kasim Riau.

Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2010). *Theories of human communication*. Waveland Press.

Luckmann, P. L. B. And T. (1996). *The Social Contruction Of Reality: A Treatise In The Sosiology Of Knowledge*. The Penguin Press.



obing, P. O. (2022). *Objektivitas Pemberitaan Media Daring ompas.Com Dan Cnnindonesia.Com Terkait Pencalonan Prabowo ibianto Pada Pemilihan Presiden 2024* [Universitas Sumatera Utara].

<https://Repositori.Usu.Ac.Id/Handle/123456789/50027>

- Luthfiyah, F. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. Rosda Karya.
- Madanisa, S. (2023). *Madanisa, S. (2023). Pengaruh Pemberitaan Pembunuhan Brigadir J Di Kompas.Com Terhadap Citra Polisi Di Kalangan Mahasiswa Jurnalistik Uin Jakarta. (Tesis). Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Marwantika, A. I., & Nurwahyuni, N. (2021). Independensi Beritatrends.Com Dalam Pemberitaan Politik Lokal Jawa Timur. *Journal Of Communication Studies*, 1(01), 1–18. <https://doi.org/10.37680/Jcs.V1i01.691>
- Mauliansyah, F. (2019). Politik Media; Sebuah Pelajaran Keberpihakan Media Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2014. *SOURCE : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(2), 15–28. <https://doi.org/10.35308/Source.V4i2.919>
- Mawara, Z. (2013). Periklanan Dan Citra Merek Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Kendaraan Bermotor Yamaha. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 826–835. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1891/1500>
- Mcnaair, B. (1995). *An Introduction To Political Communication*. Routhledge.
- McQuail, D. (1987). *Teori Komunikasi Massa*, Agus Dharma dan Aminuddin Ram. Jakarta: Erlangga.
- Mcquail, Daniel. (2005). *Teori Komunikasi Massa*. Erlangga.
- Mcquail, Denis. (2012). *Teori Komunikasi Massa Mcquail*. Salemba Humanika.
- Morissan. (2013). *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*. Prenadamedia Group.
- Muda, D. I. (2008). *Jurnalistik Televisi Menjadi Reporter Profesional*. PT Remaja Rosdakarya.



T. (2018). *Persamaan dan Perbedaan Agenda Setting, Framing dan Priming*. https://bdtbt.esdm.go.id/wp-content/uploads/2018/08/2toni_anton.pdf. Diakses Kamis, 14 Juni 2024.

- Mulyana, D. (2005). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, N. I. (2024). Teori Komunikasi Agenda-Setting dalam K-Pop: Peran Media terhadap Motivasi, Kepuasan, dan Loyalitas Fans dalam Mendukung Grup Idola. *Journal Sains Student Research*, 2 (1), 201-214.
- Mustika, M. L. (2018). *Menakar Netralitas Dan Independensi Media Massa Terhadap Kebijakan Publik (Studi Kasus Surat Kabar Palopo Pos Dan Koran* [Http://Repository.Iainpalopo.Ac.Id/Id/Eprint/1286/1/Linda Mustika.Pdf](Http://Repository.Iainpalopo.Ac.Id/Id/Eprint/1286/1/Linda%20Mustika.Pdf)
- Mutmainnah, S. (2016). Strategi Penyajian Berita Pada Portal Fajar *Online.Com. Fakultas Ilmu Komunikasi*, 50–57.
- Muzaki. (2020). Analisis *Framing* Pemberitaan Pasca Debat Calon Dan Wakil Calon Presiden Pada Media *Republika.Co.Id. Skripsi*.
- Nabi, Robin L & Oliver, Mary Beth. (Penyunt.). (2009). *Media Processes and Effects*. California: Sage.
- Nasution, Z. (2015). *Etika Jurnalisme Prinsip-Prinsip Dasar*. Rajawali Pers.
- Nazif, A. R. (2016). Politik Dan Media Massa Studi Atas Metro Tv Dalam Pembentukan Citra Joko Widodo Dan Prabowo Subianto Pada Pemilihan Presiden 2019. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 1–23.
[Https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/63194%0Ahttps://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/63194/1/ARD ANA RAFI NAZIF.IP.Pdf](Https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/63194%0Ahttps://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/63194/1/ARD%20ANA%20RAFI%20NAZIF.IP.Pdf)
- Nimmo, D. (1989). *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan Dan Media*. Remaja Rosdakarya.
- Nurhasanah. (2011). Analisis Produksi Siaran Berita Televisi (Proses Produksi Siaran Program Berita Reportase Minggu Di Trans TV). *Analisis Produk Siaran Berita Televisi*.



(2009). *Jurnalisme Masa Kini*. Rajawali Pers.

uni. (2020). *Independensi Media Online Dalam Pemberitaan Politik* *skripsi*. 1, 1–66.

[Http://Etheses.Iainponorogo.Ac.Id/9633/1/Skripsi Nurwahyuni.Pdf](Http://Etheses.Iainponorogo.Ac.Id/9633/1/Skripsi%20Nurwahyuni.Pdf)

Ode, C. A. A. (2014). Kredibilitas Pemberitaan Pada Portal Berita *Online* Kompas.Com. *Skripsi*, 92.

Parawansyah, D. O., & Elfiandri, E. (2022). Analisis Isi Editorial Pemberitaan Pasca Pilpres Di Harian Mediaindonesia.Com Dan Tempo.Co Periode April-Mei 2019. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi*, 3(5), 265. <https://doi.org/10.24014/jrmdk.v3i5.13311>

Pers, D. (2014). Mengungkap Independensi Media. *Jurnal Dewan Pers*.

Peter Schroder. (2004). *Strategi Politik*. Friedrich-Naumann-Stiftung.

Poentarie, E. (2015). Komparasi Kebenaran, Relevansi, Keseimbangan Dan Netralitas Dalam Pemberitaan (Studi Konten Analisis Terkait Pemberitaan Pemilu Presiden 2014 Di Harian Kompas Dan Koran Sindo). *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 19(1), 1–13.
<https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jskm/article/view/190101/229>

Potter, D. (2009). *Buku Pegangan Jurnalisme Independen*. Buku Pegangan Informasi Internasional Departemen Luar Negeri AS.

Purwanto, N. E., Budiasa, M., & Roring, F. P. (2022). Media Massa, Olahraga Dan Politik Dalam Penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2023 (Analisa Wacana Kritis Pernyataan Penolakan Israel Oleh Gubernur Jawa Tengah Dan Gubernur Bali Pada Pemberitaan Media Daring Kompas.Id Periode Maret 2023. *Jurnal Communitarian*, 5(1), 765–783.

Putera, E. G. (2014). *Bingkai Media Terhadap Pemberitaan Capres Jokowi Pada Pilpres 2014 (Analisis Framing Media Online Kompas . Com Dan Detik . Com) Skripsi Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan Strata 1 Penyusun Nama NIM : Ghanes Eka Putera. 2014.*

Putri, A. D. (2021). Analisis *Framing* Kontroversi Pilkada Kota Makassar 2020 (Studi Komparasi Sindonews.Com Dan Fajar.Co.Id). *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2020.
[https://repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/57517](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57517)



K. M. (2021). *Media Cetak: Pengertian Dan Jenisnya*. Kompas.Com.

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/12/06/103349769/Media-Cetak-Pengertian-Dan-Jenisnya>

Rabbani, A. (2021). *Pengertian Gagasan, Tujuan, Hal Yang Harus Diperhatikan, Tolak Ukur, Bertukar Gagasan, Dan Diskusi*. Sosial79.
<https://www.sosial79.com/2021/01/Pengertian-Gagasan-Tujuan-Hal-Yang.Html>

Rahmiyati. (2015). Media Cetak Dan Elektronik Dalam Bimbingan Penyuluhan. *Al-Hiwar Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah*, 3(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.18592/al-hiwar.v3i6.1210>

Rizalni, R., Studi, P., Komunikasi, I., Psikologi, F., Ilmu, D. A. N., Budaya, S., & Indonesia, U. I. (2021). *Pembatasan Sosial Berskala Besar Oleh Gubernur Jawa Barat Analisis Framing Pada Portal Berita Tempo.Co Dan Kompas.Com*.

Rusli, I., Ahdan, S., & Idris, M. (2022). Analisis *Framing* Konstruksi Pemberitaan Presiden Jokowi Terkait Persiapan Pemilu 2024 Di Media Kompas. Com Dan Republika. Co. Id. *Respon Jurnal Ilmiah ...*, 160–168.
<https://jurnal.ilkom.fs.umi.ac.id/index.php/respon/article/view/186%0Ahttps://jurnal.ilkom.fs.umi.ac.id/index.php/respon/article/download/186/156>

Santana, S. (2005). *Jurnalisme Kontemporer* (Jakarta). Yayasan Obor Indonesia.

Saputra, F. T. (2020). Komunikasi Antar Budaya Etnis Tionghoa Dan Penduduk Muslim Di Banten. *Dialektika Komunika: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Pembangunan Daerah*, 7(2), 147–156.
<https://doi.org/10.33592/dk.v7i2.366>

Saputra, H. (2019). Persepsi Mahasiswa Terhadap Berita *Online* Jejamo.Com Sebagai Sumber Informasi Seputar Lampung. *Skripsi*, 4(1), 1–23.

Sembrani. (2021). *Agenda Setting, Framing & Priming*.
<https://syafiqb.com/2021/11/22/agenda-setting-framing-priming/>. Diakses pada Jumat, 14 Juni 2024.



, E. (2023). *Arti Kata Gagasan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online*. Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/gagas>

- Sinaga, Y. H. (2018). Menyoal Netralitas Dan Independensi Media Massa. *Analisa Daily*.
- Siregar, B. (2019). *Framing* Berita Capres-Cawapres Pada Pilpres 2019 Di Harian Umum Republika Dan Koran Tempo Komunikologi. *Universitas Esa Unggul Jalan Arjuna Utara, 16(1)*, 11510.
- Subiakto, H., & Ida, R. (2012). Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sobur, A. (2002). *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, Dan Analisis Framing*. PT Rosdakarya.
- Sobur, A. (2015). *Analisis Teks Media*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Sodikin, A. (2014). Konstruksi Pemberitaan Pdp Di Media Massa: Analisis *Framing* Pernyataan Pakar Komunikasi Politik Di Kompas.Com. *Journal Communication Spectrum, 4 No.1*.
- Steele, J. (2023). *Digital News Report 2023 Indonesia*. Reuters Institute. <https://Reutersinstitute.Politics.Ox.Ac.Uk/Digital-News-Report/2023/Indonesia>
- Sumadiria, H. (2016). *Hukum Dan Etika Media Massa: Panduan Pers, Penyiaran, Dan Mediasiber*. Simbiosis Rekatama Media.
- Susanto, E. H. (2013). Dinamika Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Kajian Komunikasi, 1(2)*, 163. <https://doi.org/10.24198/jkk.v1i2.6041>
- Syafie, I. K. (1997). *Ilmu Politik*. Rineka Cipta.
- Syam, H. M., Yuniati, U., Hardi, N. M., & Tabroni, R. (2021). Book Series Jurnalisme Kontemporer: Etika dan Bisnis dalam Jurnalisme. Syiah Kuala University Press.
- W. A., & Toni, A. (2020). Jurnal Pewarta Indonesia. *Susiwyaty Chandra1, rachia Rachmi Adiarsi2, 2(1)*, 113–120.
- ka, A. (2012). *Agenda Setting Media Massa*. PT Raja Grafindo Persada.



- Tuasalamony, K., Hatuwe, R. S. M., Susiati, Masniati, A., & Marasabessy, R. N. (2020). Pengembangan Pendidikan Karakter Di Sekolah Dasar Negeri 5 Namlea. *Jurnal Pedagogy*, 7(2), 81–90.
<https://Ejournal.Upm.Ac.Id/Index.Php/Pedagogy/Article/View/608>
- Wardani, A. D., & Indrayani, H. (2018). Netralitas Konten Berita Online. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), 1–7.
<https://Ejournal.Undip.Ac.Id/Index.Php/Interaksi/Article/View/20688/140>
- Wibawa, D. (2020). Wartawan Dan Netralitas Media. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(2), 185–206. <https://doi.org/10.15575/Cjik.V4i2.10531>
- Wiryanto. (2000). *Teori Komunikasi Massa*. Grasindo.
- Wulandari, L., Effendy, E., Aini, S., Zafar, I. A., & Nuraldy, Z. (2023). Tahapan Menulis Hard News Dalam Jurnalistik. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 6651–6658.
<https://J-Innovative.Org/Index.Php/Innovative/Article/View/1138/854>
- Wulandari, M. (2020). *Strategi Media Massa Dalam Menyampaikan Pesan Politik Santun Perspektif Hukum Islam (Studi Radar Lampung)* [UIN Raden Intan].
<http://190.119.145.154/Handle/20.500.12773/11756>
- Wuryanta, E. W. (2006). Priming-Framing-Agenda Setting. Diperoleh dari [www.blogspot.com: http://ekawenats.blogspot.co.id/2006/12/priming-framing-agenda-setting.html](http://ekawenats.blogspot.co.id/2006/12/priming-framing-agenda-setting.html). Diakses pada Kamis, 14 Juni 2024
- Yulanda, A., Fitriasia, A., & Rekrutmen Artis Sebagai Calon Legislatif Ditinjau Dari Perspektif Aksiologi Fenomena Rekrutmen Artis Sebagai Calon Legislatif Ditinjau Dari Perspektif Aksiologi, F. (2023). *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora The Phenomenon Of The Recruiting Asrtists As Legislative Candidates Examined From The Perspective Of Axiology*. 07(01).
<https://Online-Journal.Unja.Ac.Id/Index.Php/Titiane>
- Yunus, S. (2010). *Jurnalistik Terapan*. Ghalia Indonesia.



LAMPIRAN

Naskah Berita 1

Saat Anies, Ganjar, Prabowo Dicecar soal Harta dan Persiapan Dana Kampanye...

Kompas.com - 20/09/2023, 06.00 WIB

AP Aryo Putranto Saptohutomo
Editor



Ilustrasi (KOMPAS)

Ad placed by Google

Saca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Ketiga tokoh yang menjadi bakal calon presiden, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto, ditanyai perihal harta kekayaan dan kaitannya dengan kemampuan logistik jika masa kampanye tiba.

Ketiganya hadir dalam program "Mata Najwa: 3 Bakal Capres Bicara Gagasan", yang dilaksanakan di Grha Saba Pramana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa (19/9/2023).

Dalam kegiatan itu, pembawa acara Mata Najwa, Najwa Shihab, bertanya kepada setiap bakal capres mengenai perkiraan dana kampanye.

Bahkan, Najwa juga memaparkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari masing-masing kandidat. Berikut ini jawaban dari Anies, Ganjar, dan Prabowo terkait harta kekayaan mereka dan kaitannya dengan kemampuan logistik di masa kampanye.

Baswedan



1. Dalam membedah gagasan bakal capres, Najwa sempat memaparkan data N terakhir milik Anies yang merupakan bakal capres dari Koalisi Aman untuk Persatuan (KPP).

Dari data LHKPN diketahui Anies memiliki harta sebesar Rp 11,19 miliar. Jika dibandingkan dengan pesaingnya, kekayaan Anies merupakan yang paling kecil. Anies mengaku, asetnya kebanyakan dalam bentuk hutang. Ia menyebut hingga saat ini, masih memiliki kredit rumah.

Najwa kemudian mempertanyakan uang yang sudah digelontorkan dalam safari politik Anies ke berbagai daerah, setelah dideklarasikan sebagai bakal Capres pada Oktober 2022. Menjawab pertanyaan itu, Anies memilih berseloroh kepada audiens yang hadir apakah bersedia untuk menyumbang, alih-alih menjawab angka yang ditanyakan Najwa Shihab.

"Mudah-mudahan di sini ada yang mau nyumbang, nanti," tutur Anies.

Menurut Anies, dana safari politik didapat dari bantuan para relawan.

"Jadi gerakan yang kami dorong, gerakan perubahan, dilakukan ramai-ramai, lah. Begitu banyak yang membantu, mayoritas bantuannya tidak dalam bentuk rupiah," ucap Anies.

"Kami dipinjami rumah, kendaraan, staf-staf yang kita bekerja bersama sebagian adalah mereka dibayar oleh perusahaan-perusahaan yang mau membantu kita. Jadi, secara pembiayaan itu bukan pembiayaan seperti diberikan rupiah bentuknya adalah natura," imbuh Anies.

Akan tetapi, menurut Najwa kebutuhan uang di tengah persaingan politik berbiaya tinggi tidak bisa dihindari.

Anies pun kembali berkelit tidak ingin menyebut besaran dana yang digelontorkan. Ia mengatakan, koalisinya tidak berencana mengumpulkan uang.

Mantan Menteri Pendidikan itu menyatakan, dana didapat dari 600 relawan yang melakukan kegiatan pengumpulan dana atau fund raising di tempatnya masing-masing.

"Bukan kami mengumpulkan dana, mereka yang mengumpulkan, mereka (yang) bekerja. Kalau saya datang ke sebuah tempat, maka tuan rumah di sana yang akan meng-handle seluruh biayanya. Ini menjadi sebuah iuran," jelas Anies.

Mendengar jawaban Anies, Najwa lantas bertanya soal langkah konkret apa yang akan diambil Anies pada masa-masa kampanye, selain mengandalkan pengumpulan dana dari para relawan.

Menjawab hal itu, Anies mengaku telah membuat desain kaos dan spanduk untuk kampanye. Dengan demikian, siapapun bisa mencetak alat-alat peraga itu, dengan ajakan untuk melakukan perubahan di Indonesia.

"Sendiri tidak mencetak, tapi kami siapkan konten dan kami minta kepada Anda, bila Anda percaya apa yang kami rencanakan, akan kami kerjakan. Bantu



kami untuk melakukan perubahan di republik ini, karena tidak mungkin kita kerjakan sendiri," jawab Anies.

2. Ganjar Pranowo

Bakal capres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ganjar Pranowo juga tidak luput dari pertanyaan mengenai harta kekayaan dan persiapan dana kampanye.

Dalam kegiatan itu diungkap data LHKPN Ganjar. Ganjar mempunyai kekayaan sebesar Rp 13,45 miliar.

Menurut Ganjar, setelah dia menyelesaikan masa jabatan sebagai Gubernur Jawa Tengah, hartanya tidak banyak bertambah.

Ganjar mengaku masih mempunyai utang buat membangun rumah di Yogyakarta setelah terlebih dulu menjual rumahnya di Cibubur.

Mengenai ongkos yang tinggi dalam Pilpres, Ganjar menyatakan dia didukung oleh partai-partai pengusung dan pendukung.

"Ada yang lupa seolah-olah saya berjalan sendiri. Tidak, ada partai pengusung dan besok itu pertama kalinya pilpres pilihan legislatif bersama maka sekarang pembiayaan dari partai menyiapkan," kata Ganjar.

Menurut Ganjar, persoalan modal yang tinggi dalam politik dipecahkan melalui upaya gotong royong dari partai pengusung dan pendukung, serta para relawan.

"Saya tidak diberikan tugas untuk itu (dana kampanye) maka saya berjalan sesuai dengan penugasan saya sebagai capres," ucap Ganjar.

3. Prabowo Subianto

Dalam ajang paparan gagasan itu, Prabowo merupakan bakal capres yang mempunyai jumlah kekayaan paling besar dibanding Anies dan Ganjar.

Menurut LHKPN, kekayaan Prabowo mencapai Rp 2,04 triliun. Dia mengaku memperoleh kekayaan itu dari kegiatan sebagai pengusaha selama 20 tahun terakhir.

Meski mempunyai harta yang banyak, Prabowo menilai hal itu bukan jaminan untuk tidak terlalu repot memikirkan soal sumber pendanaan safari politik dan kampanye.



"Saya kira bukan aman, dalam arti saya katakan tadi umpama punya tanah berapa puluh tahun nilai tambah, kalau dijual belum tentu ada yang beli," kata Prabowo.

Untuk biaya politik Pilpres 2024 mendatang, menurut dia, sekarang partai besutannya yakni Gerindra sudah bisa membiayai sendiri.

"Partai punya idealisme akan bayar sendiri. Self financing sudah berjalan, tidak pernah saya kasih uang Gerindra di provinsi kabupaten. Mereka buat kantor sendiri," kata dia.

Prabowo juga menilai harus ada terobosan sebagai jalan keluar biaya politik yang tinggi dalam Pemilu dan Pilpres.

"Harus ada bagaimana caranya biaya politik dibuat rendah," ujar Prabowo.



Naskah Berita 2

Mimpi Ganjar, Prabowo, dan Anies jika Jadi Presiden: Akses Pendidikan Setara, Perluasan Lapangan Kerja

Kompas.com - 20/09/2023, 09:01 WIB

FC Fitria Chusna Farisa
Penulis

2

19



Foto stok: Ganjar Pranowo - Prabowo Subianto - Anies Baswedan (KOMPAS.com/KRISTUANTO PURNOMO)



JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga bakal calon presiden (capres) Pemilu 2024, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan, bicara soal mimpi-mimpi mereka jika terpilih menjadi presiden RI selanjutnya.

Ini disampaikan ketiganya ketika hadir dalam acara "3 Bacapres Bicara Gagasan" yang digelar oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa (19/9/2023).

Sejumlah sektor disoroti oleh Ganjar, Prabowo, maupun Anies. Ketiganya, bicara tentang pendidikan, kesehatan, hingga lapangan kerja.

Gagasan Ganjar

Di bidang pendidikan, bakal capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengusulkan supaya materi pembelajaran dikaitkan dengan kebutuhan industri. Tujuannya, supaya pencari kerja bisa terserap dengan optimal.

Ganjar mengaku pernah menerapkan langkah tersebut di tiga Sekolah Menengah Teknik (SMK) di Jawa Tengah. Hasilnya pun tak mengecewakan.



Jika saya jadi gubernur, saya buat SMK di Jateng, tiga sebagai uji coba, hanya untuk anak dari kelompok miskin. Ketat, kami bayar penuh, boarding school, sampai

hari ini 100 persen lulusannya terserap,” kata Ganjar di Grha Sabha Pramana UGM Yogyakarta.

Saat menjalankan program ini, Ganjar mengaku memberikan keleluasaan bagi industri untuk ikut mengatur materi pembelajaran bagi siswa di tiga SMK.

“Pada saat itu, di tengahnya, kita bekerja sama dengan industri. Industrinya, saya izinkan, sebagai teaching industry, mereka boleh mengubah kurikulum,” ungkap mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu.

Menurut Ganjar, mekanisme ini sangat mungkin diterapkan dalam pola pendidikan nasional. Harapannya, lulusan SMK maupun perguruan tinggi memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri atau perusahaan.

“Pertanyaan saya, apakah kita di dunia pendidikan mau, dan mampu untuk melakukan fitting, adjust, adaptasi dengan kondisi itu? Kalau itu terpenuhi, kita siapkan,” tutur politikus PDI-P tersebut.

Ide Prabowo

Sementara, bakal capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto banyak bicara soal lapangan pekerjaan. Jika terpilih sebagai presiden kedelapan RI, ia mengaku bakal menyeting penjualan bahan mentah ke negara lain.

Prabowo tidak ingin sumber daya alam (SDA) Indonesia yang sebenarnya bernilai tinggi, diekspor dengan harga murah.

"Ini yang akan percepat lompatan kita. Sekarang, di bawah pemimpin Pak Jokowi, kita tak mau sumber alam kita diekspor dijual murah. Kita hentikan ekspor murah, kita olah di Indonesia," katanya.

Prabowo menyebut, Indonesia punya banyak SDA yang jumlahnya melimpah, seperti nikel dan bauksit. Sebagai komoditas andalan, pembangunan smelter nikel dan bauksit di Tanah Air terus dilanjutkan.

Harapannya, masifnya pembangunan pabrik ini akan berdampak pada perluasan lapangan kerja.

"Ini pekerjaan saudara-saudara semua, anak-anak kita. Kita tidak mau anak-anak kita diupah rendah," ucapnya.

Upaya itu, menurut Prabowo, harus dibarengi dengan pemberantasan korupsi. Sebab, praktik korupsi menghambat kemajuan negara.



antas korupsi adalah penyakit menghambat kita dan harus selesaikan,"
ia Umum Partai Gerindra itu.

Prabowo juga menyampaikan gagasan tentang program swasembada pangan. Lewat program ini, Menteri Pertahanan ini ingin agar Indonesia ke depan jadi lumbung pangan dunia.

"Mencapai swasembada pangan kita bukan saja jadi swasembada kita bisa jadi lumbung pangan dunia itu cita-cita," tuturnya.

Misi Anies

Di sisi lain, bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengungkap, misi utama gerbong koalisinya adalah menghadirkan keadilan dan kesetaraan di bidang kesehatan hingga pendidikan.

"Kita sekarang bertanggung jawab menghadirkan keadilan kesetaraan. Itulah misi utama dari perubahan," kata Anies.

Anies menuturkan, misi itu menjadi landasan utama koalisi untuk merencanakan perbaikan di berbagai bidang.

Di bidang kesehatan, misalnya, Anies ingin akses kesehatan di seluruh wilayah Indonesia dan seluruh lapisan masyarakat, baik ibu mengandung, ibu hamil, hingga anak-anak setara.

"Apa terjemahannya? Kami menginginkan, kami merencanakan agar akses-akses pada fasilitas dasar (menjadi) setara. Kesehatan, kita menginginkan agar akses kepada kesehatan mulai ibu mengandung, bayi dalam kandungan, sampai ketika mereka aktif, itu coverage atas keterjaminan kesehatan," tuturnya.

Di bidang pendidikan, Anies ingin anak-anak di dalam negeri memiliki kesetaraan kesempatan mengenyam pendidikan. Sebab kata dia, pendidikan merupakan bekal utama untuk mengembangkan potensi setiap manusia di Indonesia.

Anies bahkan tidak ingin menggunakan istilah "sumber daya manusia", namun menyebutnya sebagai pengembangan kualitas manusia Indonesia. Faktanya, kata Anies, saat ini tidak semua anak di Indonesia memiliki akses yang setara.

"Jumlah bangku SD sama SMA yang sekarang bentuknya seperti piramida. Makin tinggi jenjang pendidikannya, makin sedikit jumlah bangkunya. Artinya, banyak anak-anak kita yang tersingkir. Tidak bisa mendapatkan pendidikan minimal hingga pendidikan menengah," ujarnya.

Selain soal akses, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini ingin biaya pendidikan terjangkau. Pemerintah, kata dia, memiliki tanggung jawab untuk mengurangi beban pengelola kampus.

Anies, pengelola kampus tidak bisa dibebani dengan tanggung jawab besar mencari biaya untuk kegiatan kampus.



"Tapi biar pengelola kampus fokus pada penelitian, pada pengembangan, pembelajaran, pendidikan, supaya kampus betul-betul menjadi institusi yang memungkinkan siapa saja berpartisipasi. Sudah cukup biaya pendidikan yang terlalu tinggi di kampus-kampus kita," lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu.



Naskah Berita 3

Saat Ganjar, Prabowo, dan Anies Bicara soal KPK, Kontra dengan Megawati...

Kompas.com - 20/09/2023, 10:14 WIB

Fitria Chusna Farisa
Penulis



Ilustrasi survei elektabilitas kandidat capres. (ilustrator: KOMPAS.com/ANDIKA BAYU SETYAJI)

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga bakal calon presiden (capres) Pemilu 2024, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan, bicara soal kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebab, beberapa waktu lalu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sempat mengusulkan supaya KPK dibubarkan karena dianggap tidak efektif.

"Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, 'Sudah deh bubarkan saja KPK itu, Pak, menurut saya enggak efektif,'" ucap Megawati, 21 Agustus 2023.

Meski punya gagasan yang berbeda, pada pokoknya, ketiga bakal capres ingin supaya KPK diperkuat. Baik Ganjar, Prabowo, maupun Anies setuju bahwa pemberantasan korupsi harus terus dilanjutkan.

Ini disampaikan ketiganya saat hadir dalam acara "3 Bacapres Bicara Gagasan" yang digelar oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa (19/9/2023).



gulasi

pres PDI-P Ganjar Pranowo mengaku, dirinya akan mengutamakan n KPK, kendati ketua umum partai tempatnya bernaung sempat lkan pembubaran lembaga antirasuah tersebut.

"Dikuatkan. Harus saya jawab ketiga kalinya, satu dikuatkan," kata Ganjar.

Selain itu, jika terpilih sebagai presiden, Ganjar menyebut bakal melakukan revisi regulasi. Menurut dia, Undang-Undang KPK membutuhkan interaksi kekuasaan (political interplay).

Ia yakin UU KPK dapat diperbaiki jika lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif sepakat melakukan perubahan.

"Kalau kemudian semua dalam satu barisan sepakat, maka apa yang akan dilakukan itu bukan hal yang sulit," ujarnya.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyebut, korupsi terjadi karena kebiasaan di masyarakat. Selain itu, aturan yang menguntungkan sebagian kalangan dan sistem yang korup juga dia nilai sebagai akar korupsi.

"Maka saya tuliskan dalam solusi ini, penguatan Kejaksaan, KPK, dan kepolisian yang disebut sebagai APH (aparap penegak hukum)," tutur politikus PDI-P itu.

Tak dibubarkan

Kontra dengan Megawati, bakal capres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, menilai, KPK masih dibutuhkan.

Namun demikian, menurutnya, wajar jika banyak pihak yang merasa kecewa dengan kinerja KPK yang dianggap semakin lemah setelah berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019.

"Saya kira, kita membangun negara ini wajar kita kecewa, pasti banyak kita tidak puas dan memang benar bahwa harus ada pengawasan karena kekuasaan condong untuk membuat orang korup," ujar Prabowo.

Seandainya terpilih sebagai presiden kedelapan RI, Prabowo mengaku ingin memperbaiki cara kerja KPK. Sejalan dengan itu, katanya, pengawasan terhadap lembaga antirasuah tersebut juga harus terus diperkuat.

Ketua Umum Partai Gerindra itu tak ingin KPK dibubarkan karena adanya anggapan melemahnya kinerja pemberantasan korupsi.

"Harus kita cari upaya-upaya, kita perbaiki. Tapi yang penting jangan ada kesan ini tidak baik, bubarkan, nah itu jangan," tuturnya.

Prabowo tak menyampaikan secara rinci apakah ia bakal merevisi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK jika nantinya terpilih sebagai kepala negara. Namun, ia bakal berdiskusi dengan banyak pihak untuk memperbaiki lembaga tersebut.



“Ya kita nanti akan kumpulkan, stakeholder, pakar-pakar hukum dari berbagai sumber dan kita cari yang terbaik untuk bangsa,” lanjut Menteri Pertahanan itu.

Kembali Independen

Menjawab ini, bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, berpendapat, KPK harus dikembalikan menjadi lembaga independen. Menurutnya, independensi lembaga antirasuah itu berkurang setelah berlakunya aturan baru dalam UU KPK.

“Ketika ada revisi (UU) yang membuat staf KPK, karyawan KPK, menjadi ASN sebagaimana ASN yang lain, otomatis mereka tidak lagi memiliki ruang untuk mandiri,” ujar Anies.

Selain itu, menurut Anies, kedudukan KPK yang kini berada di bawah presiden juga rentan mendapatkan intervensi. Sebab, tak ada yang bisa menjamin seperti apa karakter kepemimpinan presiden Indonesia pada masa mendatang

“Bila di bawah presiden dan diberi ruang yang bebas maka itu lain. Tapi, kita tidak pernah tahu siapa presiden di masa yang akan datang, apakah akan selalu memberikan ruang untuk menjalankan tugas sesuai kewenangannya?” katanya.

Meski demikian, kata Anies, kinerja KPK harus tetap diawasi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak ingin independensi KPK justru menekan pihak-pihak tertentu karena besarnya kewenangan mereka.

“Tapi KPK juga harus diawasi, tidak ada malaikat di negeri ini, semua adalah manusia dan manusia punya kecenderungan ketika mendapatkan kekuasaan, dia akan abuse kekuasaan itu. Termasuk juga yang berada di dalam KPK,” tutur mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut.



Naskah Berita 4

Kala Anies, Ganjar, Prabowo Bicara soal Reformasi Hukum dan Polisi...

Kompas.com - 20/09/2023, 11:20 WIB



Aryo Pujiyanto Saptohetomo
Editor



Lihat Foto

Ilustrasi hukum. (freepik.com/kpargeter)

Baca berita selengkapnya. [Gabung Kompas.com](https://www.kompas.com)

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Ketiga bakal calon presiden yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, serta Prabowo Subianto menyampaikan gagasan mereka terkait reformasi institusi aparat penegak hukum dan penegakan hukum.

Gagasan itu disampaikan oleh ketiganya dalam program Mata Najwa: 3 Bakal Capres Bicara Gagasan, yang dilaksanakan di Grha Saba Pramana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa (19/9/2023).

Setiap bakal capres dihadirkan dalam waktu yang berbeda dan diberikan pertanyaan dari pembawa acara Mata Najwa, Najwa Shihab. Salah satunya soal pandangan mereka terkait situasi penegakan hukum pada saat ini.

Berikut ini rangkuman gagasan dari Anies, Ganjar, dan Prabowo terkait upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

1. Anies Baswedan

Anies yang merupakan bakal capres yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) menilai aparat penegak hukum saat ini belum bersikap adil.



ri ini punya kesempatan untuk maju, tapi selama rule of law, kepastian, penegakan hukum tidak menjadi prioritas, maka yang terjadi adalah tata pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Praktik korupsi masif di mana-mana," ujar Anies dikutip dari tayangan di YouTube Universitas Gadjah Mada.

Baginya, saat ini aparat penegak hukum hanya berani memberikan tindakan tegas pada kelompok yang lemah. Sementara, kelompok yang kuat jarang mendapatkan perlakuan serupa.

Ia mengatakan aparat penegak hukum tidak menunjukkan sikap adil pada pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan.

“Mereka yang kawan tak tersentuh, mereka yang lawan disentuh terus,” sebut dia.

Anies berjanji, jika memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, ia bakal memprioritaskan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

“Ini harus diubah, pemberantasan korupsi menjadi prioritas penting, penegakan hukum menjadi prioritas dan membuat pengadilan kita menjadi pengadilan yang kredibel. Itu prioritas kita. Ini adalah aspek yang membuat Indonesia kita bisa take off,” imbuh dia.

Anies juga menyoroti soal kualitas sumber daya manusia (SDM) anggota Polri. Menurut dia kualitas SDM Polri patut ditingkatkan buat menghadapi persoalan zaman.

“Harus ada pengembangan profesionalisme, kompetensi. Ini fakta di lapangan bahwa banyak sekali saudara-saudara kita yang bertugas di kepolisian tidak mengalami pembekalan yang cukup,” ucap Anies.

“Kalau tidak punya keterampilan, pengetahuan, kemampuan untuk bisa menggunakan segala macam teknik baru, maka teknik-teknik lama yang akan dipakai,” sambung dia.

Ia lantas mencontohkan dengan teknik interogasi yang sudah mengalami banyak perkembangan.

Mestinya, kebaruan teknik itu juga didapatkan oleh anggota Polri.

Anies menganggap minimnya upaya untuk meningkatkan kompetensi polisi dapat memicu terjadinya praktik penyimpangan dalam proses penegakan hukum.

“Tapi kalau tidak mempelajari ilmu-ilmu (interogasi) itu, maka teknik-tekniknya akan teknik-teknik lama, dan apa yang akan terjadi? Muncul praktik-praktik penyimpangan,” ujar dia.

Selain itu, Anies ingin Polri juga bersikap tegas pada anggotanya yang ukan pelanggaran hukum.



2. Ganjar Pranowo

Bakal calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ganjar Pranowo mengatakan, dia akan mendorong penguatan lembaga penegak hukum yakni Polri, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mulanya pembawa acara Mata Najwa, Najwa Shihab, bertanya kepada Ganjar terkait pernyataan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang sempat mengusulkan supaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan karena dianggap tidak efektif.

Ganjar kemudian menyampaikan, dia akan tetap mengutamakan penguatan terhadap KPK.

"Dikuatkan. Harus saya jawab ketiga kalinya, satu dikuatkan. Dua revisi regulasi," kata Ganjar.

Menurut Ganjar, revisi regulasi atau Undang-Undang KPK membutuhkan interaksi kekuasaan (political interplay).

Dia mengatakan, revisi regulasi bisa terjadi jika antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif sepakat melakukan perubahan.

"Kalau kemudian semua dalam satu barisan sepakat, maka apa yang akan dilakukan itu bukan hal yang sulit," ujar Ganjar.

Ganjar mengatakan, korupsi terjadi karena kebiasaan di masyarakat, aturan yang menguntungkan sebagian kalangan, atau sistem aturan yang korup.

"Maka saya tuliskan dalam solusi ini, penguatan Kejaksaan, KPK, dan kepolisian yang disebut sebagai APH," ucap Ganjar.

Soal reformasi Polri, Ganjar menilai hal itu sudah masuk dalam rekomendasi tim khusus percepatan reformasi hukum yang dibentuk pemerintah.

Ganjar mengatakan, rekomendasi itu harus menjadi acuan karena tim itu bekerja atas nama negara.

"Tinggal kita berbicara ketika itu ya. Bagaimana caranya. Cara kemudian diberikan pada publik sebagai bentuk partisipasi dan akuntabilitas, maka semua akan didorong bagaimana itu bisa lahir," papar Ganjar.

3. Prabowo Subianto



Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto aparkan keberadaan KPK masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Akan tetapi, dia menganggap wajar banyak pihak yang merasa kecewa dengan kinerja lembaga antirasuah itu yang dianggap semakin lemah setelah berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019.

“Saya kira, kita membangun negara ini wajar kita kecewa, pasti banyak kita tidak puas dan memang benar bahwa harus ada pengawasan karena kekuasaan condong untuk membuat orang korup,” ujar Prabowo.

Dia mengatakan, pengawasan pada KPK harus dilakukan sembari mencari cara untuk memperbaiki kinerjanya. Namun, ia tak ingin ada anggapan bahwa melemahnya KPK menjadi alasan lembaga tersebut dibubarkan.

“Harus kita cari upaya-upaya, kita perbaiki. Tapi yang penting jangan ada kesan ini tidak baik, bubarkan, nah itu jangan,” tuturnya.

Prabowo pun tak menyampaikan secara rinci apakah ia bakal merevisi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK jika nantinya memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ia mengaku perlu berdiskusi dengan banyak pihak untuk mencari jalan keluar dan memperbaiki lembaga antirasuah tersebut.

“Ya kita nanti akan kumpulkan, stakeholder, pakar-pakar hukum dari berbagai sumber dan kita cari yang terbaik untuk bangsa,” imbuh dia.

Prabowo menganjurkan supaya pemberantasan korupsi dilakukan tidak hanya dengan hukuman keras, tetapi juga dilakukan secara sistemik.

"Jadi kalau menurut saya cara mengatasi korupsi kita harus mulai dengan sistemik. Sistemnya dibuat," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini sudah membuat jera.

Meski begitu, sejumlah kalangan menilai hukuman bagi koruptor masih kurang sehingga dinilai belum menimbulkan efek jera.

Akan tetapi, menurut Prabowo hukuman berat sekalipun belum tentu ditakuti oleh orang-orang yang nekat melakukan korupsi. "Saya tahu maksud beberapa orang. Maunya kan hukuman mati seperti di Tiongkok. Ternyata orang kalau nekat ya nekat saja. Di Tiongkok, sudah ada hukuman mati masih ada korupsi yang besar-besaran di sana," ucap Prabowo.

Prabowo juga menyinggung soal kebijakan pemerintah yang menaikkan gaji penyelenggara negara sebesar 8 persen.

Menurut Prabowo, negara sebenarnya masih mampu menaikkan gaji hampir semua pejabat yang punya wewenang menentukan secara signifikan.



Prabowo juga mengambil contoh kebijakan yang diterapkan di negara lain.

Dia mengatakan, di beberapa negara-negara di Afrika, bagi pejabat-pejabat yang dinilai berhasil melaksanakan tugasnya dalam satu periode pemerintahan atau 5 tahun maka akan diganjar bonus yang cukup besar.

"Kemudian kalau kita lihat contoh di banyak negara, untuk pejabat-pejabat tertentu disiapkan rumah sakit, dia bisa berobat dengan baik, gratis. Disiapkan juga rumah, perumahan. Dia pensiun, dia bisa punya rumah sendiri. Kemudian anak-anaknya bisa sekolah asal memenuhi persyaratan akademis," ucap Prabowo.



Naskah Berita 5

Deret Gagasan Ganjar, Prabowo, dan Anies jika Terpilih Jadi Presiden

Kompas.com - 20/09/2023, 12:32 WIB



Achmad Nasrudin Yahya
Penulis



Ilustrasi Anies, Ganjar, Prabowo (Dok Kompas.com)

Iklan ditutup oleh Google

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga bakal calon presiden (capres) telah menyampaikan sejumlah gagasannya apabila terpilih menjadi presiden.

Gagasan tersebut disampaikan masing-masing bakal capres dalam dialog "3 Bacapres Bicara Gagasan" di Graha Sabha Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Selasa (19/9/2023).

Berikut deretan gagasan dari masing-masing bakal capres:

1. Ganjar Pranowo

Ganjar setidaknya menyampaikan tiga gagasan yang bisa dijalankan apabila memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

- **Pendidikan berkeadilan**

Eks Gubernur Jawa Tengah itu menyoroti semakin mahalnya pendidikan perguruan tinggi. Terlebih setelah perguruan tinggi berubah status menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH).



Ganjar mengatakan perlu melanjutkan program tersebut. Hanya saja, yang perlu dimaksimalkan adalah biaya pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Problem yang musti kita bongkar adalah 20 persen anggaran untuk pendidikan, untuk apa. kalau kemudian kita pecah, kita bongkar, kita kupas, jangan-jangan anggaran itu lebih banyak bisa untuk perguruan tinggi negeri," kata dia.

- **Reformasi Polri**

Dalam hal mereformasi kepolisian, Ganjar mengatakan yang perlu dilakukan adalah penguatan kelembagaan, seleksi, hingga profesionalisme.

Hal ini sebagaimana yang dilakukan Baharuddin Lopa.

"Dua sistem dua aktor. Tidak ada yang pernah mendengar pendekar keadilan yang luar biasa di Kejaksaan, Baharuddin Lopa," katanya.

- **KPK Diperkuat**

Ganjar juga menginginkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diperkuat. Keinginan tersebut berbanding terbalik dengan cara pandang Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Meski demikian, Ganjar menginginkan adanya revisi regulasi sekalipun sejumlah pihaknya menganggap sebagai pele mahan terhadap KPK.

"Harus saya jawab ketiga kalinya. Satu dikuatkan, kedua revisi regulasi. Revisi regulasi itu membutuhkan, satu treatment tersendiri, political interplay," kata Ganjar.

2. Prabowo Subianto

Setidaknya ada dua gagasan yang ingin diterapkan Prabowo apabila terpilih menjadi presiden. Gagasan tersebut, yakni:

- **Pertahankan KPK**

Menteri Pertahanan itu mengatakan bahwa masyarakat saat ini masih mempercayai KPK.

"Kalau kita lihat ya di masyarakat, saya kira masyarakat masih menilai KPK masih bermanfaat," kata Prabowo.

Saat disinggung mengenai melemahnya independensi KPK karena berada di bawah eksekutif hingga revisi UU KPK, Prabowo mengaku akan mengumpulkan stakeholder, pakar hukum untuk mencari yang terbaik bagi gsa.

sti banyak kita yang kecewa dan pasti banyak kita tidak puas, saya kira itu ar ya. Saya kira benar bahwa harus ada pengawasan karena kekuasaan dong untuk membuat orang korup," kata Prabowo.



- **Setop bahan mentah**

Prabowo juga ingin menyetop penjualan bahan mentah ke negara lain. Hal ini dilakukan supaya dapat mempercepat lompatan Indonesia.

Dengan penyetopan bahan mentah ini, ke depan Indonesia diharapkan bisa menghadirkan perusahaan yang dapat mengelola bahan mentah.

Kebijakan ini juga diharapkan bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat.

"Ini pekerjaan saudara-saudara semua anak-anak kita. Kita tidak mau anak-anak kita diupah rendah," ucapnya.

3. Anies Baswedan

Anies yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta juga menyampaikan beberapa gagasan apabila terpilih menjadi presiden. Berikut gagasannya:

- **Keadilan hukum**

Anies menilai Indonesia bisa menjadi negara maju jika terdapat kemauan politik yang kuat dari pemerintah untuk menegakkan hukum secara adil.

"Negeri ini punya kesempatan untuk maju, tetapi selama rule of law, kepastian hukum, penegakan hukum tidak menjadi prioritas maka yang terjadi adalah tata kelola pemerintahan tidak berjalan dengan baik," kata Anies.

Anies mengatakan, jika penegakan hukum tidak dijalankan dengan konsisten maka justru menyuburkan praktik korupsi.

Jika korupsi marak, maka sulit mendapatkan keadilan dan menghalangi cita-cita masyarakat Indonesia yang ingin makmur, sejahtera, dan menjadi negara maju.

"Yang kita saksikan aparat yang seharusnya menegakkan hukum melakukan tindakan-tindakan yang tidak setara. Mereka yang kuat tak tersentuh, mereka yang lemah tersentuh. Mereka yang kawan tak tersentuh, mereka yang lawan disentuh terus. Ini harus diubah," kata Anies.

- **Kembangkan SDM Polri**

Anies ingin sumber daya manusia (SDM) institusi Polri mengalami kembangan. Menurutnya, saat ini kompetensi anggota Polri perlu ngkatkan agar bisa menghadapi tantangan zaman.



"Harus ada pengembangan profesionalisme, kompetensi. Ini fakta di lapangan bahwa banyak sekali saudara-saudara kita yang bertugas di kepolisian tidak mengalami pembekalan yang cukup," terang Anies.

"Kalau tidak punya keterampilan, pengetahuan, kemampuan untuk bisa menggunakan segala macam teknik baru, maka teknik-teknik lama yang akan dipakai," sambung dia.

Ia mencontohkan dengan teknik interogasi yang sudah mengalami banyak perkembangan. Mestinya, kebaruan teknik itu juga didapatkan oleh anggota Polri.

Anies menganggap minimnya upaya untuk meningkatkan kompetensi polisi dapat memicu terjadinya praktik penyimpangan dalam proses penegakan hukum.

"Tapi kalau tidak mempelajari ilmu-ilmu (interogasi) itu, maka teknik-tekniknya akan teknik-teknik lama, dan apa yang akan terjadi? Muncul praktik-praktik penyimpangan," ujar dia.

- **Tata kelola pertanian dibenahi**

Anies juga menginginkan tata kelola pertanian harus diubah supaya para petani lebih sejahtera dan merasakan manfaat dari hasil tani yang mereka olah.

"Di ujung kita menginginkan agar harga kebutuhan pokok menurun, biaya kebutuhan pokok lebih murah. Di sisi lain, kesejahteraan dari para petani lebih tinggi," kata Anies.

Anies mengatakan, salah satu persoalan yang terjadi dalam tata niaga pertanian adalah biaya pengolahan pertanian lebih tinggi dari hasil produksi.

Menurut dia, indikator sederhana buat mengukur kesejahteraan petani adalah mereka harus bisa menabung dari hasil bertani.

"Pakai indikator sederhana, petani bisa menabung. Selama petani tidak bisa menabung maka biaya operasinya, biaya produksinya tidak sebanding dengan pendapatannya," ujar Anies.

